

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai Poz Gizi Penanganan Stunting (POZTING), peneliti melakukan studi pustaka dari beberapa jurnal sebagai bahan referensi untuk membantu penelitian serta menemukan data dan menambah informasi. Hal ini bertujuan mencapai diferensiasi hasil penelitian terkait dengan penanganan stunting, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam sebuah penelitian, penting untuk menganalisa sumber literatur atau studi pustaka agar dapat menambah kajian bacaan serta agar dapat menghindari pengulangan pembahasan yang mengarah pada plagiasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisa mengenai penelitian serupa pada beberapa jurnal dengan perbedaan pembahasan, sebagai berikut:

Pertama, Penelitian berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting" yang dilakukan oleh Laili & Ratna Ariesta Dwi Andriani (2019) membahas strategi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan peran masyarakat dalam konteks deteksi dini dan pencegahan stunting pada anak balita. Tujuan utama penelitian ini adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan perkembangan anak balita, dengan harapan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal. Metode penelitian melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat melalui survei pengetahuan dan pemahaman orang tua di RW 2 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Evaluasi pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap stunting dilakukan melalui pre-test dan setelahnya dilakukan post-test dengan partisipasi 35 responden. Hasil pre-test yang sudah melalui analisis menunjukkan bahwa hanya 40% responden yang memiliki pemahaman memadai mengenai program pencegahan stunting, khususnya pada ibu hamil yang sebagian besar belum sepenuhnya memahami upaya pencegahan stunting. Dalam konteks post-test, hampir

seluruh responden menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait isu ini.

Kedua, Penelitian yang telah dilakukan oleh Mediani et al. (2020) dengan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Kader Kesehatan tentang Pencegahan Stunting pada Balita". Penelitian ini membahas mengenai strategi pencegahan *stunting* yang dilakukan melalui kader kesehatan di Kabupaten Karawang. Sebanyak 44 orang kader kesehatan dilibatkan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan motivasi terkait pencegahan stunting, dengan fokus utama pada periode kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kader kesehatan dianggap memiliki peran sentral sebagai penggerak dalam posyandu, Kader kesehatan dianggap memiliki peran sentral sebagai penggerak posyandu, hal tersebut juga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam serta motivasi dengan tujuan pencegahan serta penanggulangan *stunting*. Kegiatan pemberdayaan dalam penelitian ini adalah dengan metode ceramah serta sesi tanya jawab. Hasil yang telah didapatkan melalui metode tersebut menunjukkan 77,55% kader telah mencapai tingkat pemahaman atau pengetahuan yang memadai.

Ketiga, Penelitian berjudul "Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak" yang dilakukan oleh Choliq et al. (2020), mengkaji inovasi terbaru dalam modifikasi makanan anak guna memperoleh perhatian dan meningkatkan nafsu makan. Data di kelurahan Medokan Semampir menunjukkan bahwa terdapat 30,48% prevalensi *stunting* di daerah tersebut. Salah satu faktor penentu stunting adalah penerapan makanan pengganti Air Susu Ibu (MPASI) yang tidak tepat dan kurang sehat. Pola makan dari ibu juga memiliki peranan dalam berkontribusi terhadap peningkatan angka stunting, mengingat peran ibu dalam pemilihan, persiapan, dan penyajian makanan bergizi anak.

Keempat, Penelitian berjudul "Tantangan Pencegahan Stunting pada Era Adaptasi Baru 'New Normal' Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang" oleh Candarmaweni dan Amy Yayuk Sri Rahayu

(2020) membahas upaya keberlanjutan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, khususnya pada Desa Bayumundu dan juga Desa Tegalogog, dalam konteks pencegahan stunting yang dilakukan pasca pandemi Covid-19. Pemberdayaan masyarakat diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam keberhasilan program pencegahan *stunting*. Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan kajian literatur. Dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pandeglang, terdapat sejumlah kegiatan yang memberikan dampak langsung. Hal ini mencakup distribusi Paket Makanan Tambahan (PMT), pemantauan status gizi secara berkala di Posyandu, Kelompok Rumah Tangga Pangan Lestari (KRPL), Kelompok Wanita Tani (KWT), serta bantuan pangan yang bersifat non tunai.

Kelima, Penelitian berjudul "Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Mengenai Pencegahan Stunting melalui Kegiatan Pengabdian" yang dilakukan oleh Hamzah et al. (2020) membahas strategi mengenai pencegahan *stunting* dengan fokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode interaktif ceramah diaplikasikan dalam kegiatan tersebut, diikuti oleh sesi tanya jawab, serta dilakukannya pre-test dan juga post-test. Hasil dari pre-test yang telah dilakukan melalui analisis menunjukkan rata-rata skor pengetahuan masyarakat sebesar 10,43, yang mengalami peningkatan signifikan pada post-test yaitu meningkat 9,17 hingga menjadi 19,60.

Keenam, Penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," yang dilakukan oleh Roring et al. (2021) mengulas pelaksanaan kajian ini mengulas kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Ongkaw 1. Analisis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teoritis Edward III guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi di tingkat desa tersebut. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah menggunakan metode

kualitatif, memungkinkan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi di konteks desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung dengan efektif.

Ketujuh, Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi" yang dilaksanakan oleh Shauma & Purbaningrum (2022) Analisis yang dilakukan pada Kecamatan Rajeg adalah dengan menggunakan analisis yang kebijakan dalam pencegahan percepatan pada kondisi *stunting* balita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis. Data ini dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara dengan berbagai sumber, dan obeservasi yang sudah dilakukan. Hasil analisis digunakan untuk mengolah data penelitian ini ialah dengan Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan, terdapat hasil yang kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2022) berjudul "Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang" melihat bagaimana mengatasi masalah stunting di Kabupaten Malang, Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 menetapkan kebijakan intervensi gizi spesifik. Studi ini menggunakan model yang diusulkan pada tahun 1975 oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, "A Model of the Policy Implementation Process", yang menjelaskan implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana kebijakan intervensi gizi khusus untuk mengatasi stunting di Kabupaten Malang, yang diatur melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018. Karena fokus kembali pada anggaran kesehatan selama pandemi, beberapa operasi mengalami kesulitan untuk dilaksanakan. Bidan desa dan petugas gizi, antara lain Kesembilan, Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di

Kecamatan Kie," yang dilaksanakan oleh Fallo (2020), memfokuskan pada kondisi *stunting* pada balita. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah menggunakan metode kualitatif yang berlokasi di Kecamatan Kie. Data yang diperoleh berasal dari beberapa sumber melalui beberapa cara yaitu melalui observasi, wawancara dan juga dengan penelusuran dokumen terkait program KB. Data yang sudah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis yang diadopsi dari Creswell (2016: 264-268). Hasil penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan terkait pencegahan *stunting* yang dilakukan menghadapi sejumlah permasalahan dalam implementasinya, sehingga hasil yang dari kebijakan ini belum bisa sepenuhnya didapatkan.

Kesepuluh, Penelitian ini berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes" yang dilaksanakan oleh Nurva & Maharani (2023). Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pada pengimplementasian kebijakan pencegahan *stunting* yang ada di Kabupaten Brebes, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh George Edward III, Marilee S Grindle, dan Mazmanian & Sabatier. Analisis dilakukan melalui penggunaan sudut pandang segitiga analisis kebijakan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah menggunakan metode kualitatif. Proses analisis data yang telah didapatkan nantinya adalah melalui metode open coding dengan menggunakan software QDA Miner Lite. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan secara menyeluruh di Kabupaten Brebes telah mematuhi regulasi yang berlaku. Kerjasama antara keberadaan pemerintah daerah dengan OPD terkait telah berhasil terbentuk secara optimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yang mengakibatkan kebijakan ini belum mencapai tujuannya. Rekomendasi perbaikan pun diajukan, terutama terkait perluasan atau penyempurnaan Peraturan Bupati (Perbup) yang mendukung kebijakan ini, agar sesuai dengan amanat terbaru dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan

Sebelum mengetahui lebih mendalam dalam konsep kebijakan publik, analisis awal terkait dengan makna istilah kebijakan atau "*policy*" dalam literatur perlu dilakukan. Dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kebijakan dapat ditafsirkan sebagai satu kesatuan dari konsep dan asas utama serta landasan dari rencana dalam pengimplentasian suatu pekerjaan, kepempunanan dan cara dalam bertindak, khususnya terkait dengan pemerintahan serta organisasi. Ini termasuk pernyataan tentang tujuan, cita-cita, prinsip, dan garis pedoman yang membantu manajemen mencapai sarannya. Menurut Leo Agustino (2008), Carl J. Federick menggambarkan kebijakan sebagai kumpulan tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini berpendapat bahwa definisi kebijakan mencakup perilaku yang didalamnya terdapat niat dan tujuan. Istilah "kebijakan" masih menjadi subjek yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Solichin (Abdul Wahab, 2008). Beberapa baris besar diberikan untuk mempermudah pemahaman konsep ini, kebijakan harus dibedakan dari keputusan, tidak selalu dapat dibedakan dengan administrasi, mencakup perilaku dan harapan, dapat mencakup tindakan atau ketiadaan tindakan, memiliki hasil akhir yang diharapkan, memiliki tujuan atau sasaran tertentu, muncul dari suatu proses berkelanjutan, melibatkan hubungan antar dan intra organisasi, terkait dengan lembaga pemerintah dalam konteks kebijakan publik, dan dirumuskan atau diartikan secara subyektif.

“Kebijakan ekonomi Jepang” atau “kebijakan luar negeri Indonesia” adalah beberapa contoh frase kebijakan, menurut Budi Winarno (2007). Namun, kebijakan sering kali mengacu pada sesuatu yang lebih spesifik, seperti kebijakan debirokartisasi dan deregulasi

yang dilakukan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Solihin Abdul Wahab dan Budi Winarno, kebijakan mencakup tindakan konkret dan bukan sekadar gagasan atau niat. Namun, istilah "kebijakan" sering diganti dengan istilah seperti "tujuan, keputusan, undang-undang, ketentuan, standar, proposal, dan grand design".

Irfan Islamy (2010) menekankan perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pelaku atau kelompok pelaku untuk menangani masalah atau masalah tertentu. Menurut James E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh individu atau sekelompok individu untuk memecahkan masalah tertentu. Islamy (2009) Pendapat ini dianggap lebih akurat karena mereka fokus pada tindakan nyata daripada gagasan atau tujuan tertentu. Richard Rose mengatakan bahwa kebijakan harus dilihat sebagai kumpulan tindakan yang mempengaruhi berbagai pihak, bukan satu keputusan, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2007: 17).

Menurut perspektif ini, kebijakan dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dengan sengaja atau tidak. Kebijakan melibatkan elemen keputusan dalam memilih antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan memiliki dampak langsung pada pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan dapat melibatkan aspek perilaku, harapan-harapan, dan proses yang berlangsung sepanjang waktu. Oleh karena itu, membedakan istilah kebijakan dari istilah keputusan dan memahami kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan konsekuensi bagi para pelaku adalah aspek penting dalam memahami konsep kebijakan secara holistik.

2. Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu kumpulan tindakan yang rumit yang melibatkan banyak fase dan faktor yang

berbeda, yang memerlukan penelitian menyeluruh. Untuk membuat pemahaman dan analisis kebijakan publik lebih mudah, beberapa ahli politik yang mempelajari kebijakan publik telah membaginya ke dalam beberapa tahap. Namun, urutan tahapan dapat berbeda di antara para ahli tersebut. William Dunn mencatat beberapa tahap penting dalam proses membuat kebijakan publik, seperti dikutip oleh Budi Winarno (2007). Berikut tahapan-tahapan dalam kebijakan:

- a. Tahap penyusunan agenda menjelaskan bagaimana pejabat yang ditunjuk menetapkan masalah-masalah yang memerlukan perhatian publik. Sebelum masalah-masalah tertentu dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, perlu terlebih dahulu mencapai kompetensi antarmasalah. Sementara beberapa masalah dapat diabaikan sepenuhnya, yang lain dapat menjadi perhatian utama atau ditunda untuk waktu yang lebih lama karena alasan tertentu.
- b. Tahap formulasi kebijakan, yang menyusul tahap sebelumnya, melibatkan pembahasan intensif oleh para perumus kebijakan. Masalah-masalah yang telah diakui sebelumnya didefinisikan secara cermat untuk mencari solusi terbaik. Alternatif kebijakan (policy alternatives/policy options) diusulkan dan bersaing untuk mendapatkan status sebagai pemecahan masalah terpilih. Kompetisi antar para pemangku kepentingan terjadi dalam upaya untuk mendukung solusi yang diusulkan.
- c. Pada tahap selanjutnya, penerapan kebijakan terjadi ketika mayoritas legislatif, konteks antara lembaga direktur, atau keputusan mendukung kebijakan yang diusulkan.
- d. Tahap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan program dilaksanakan oleh badan administrasi dan agen pemerintah di tingkat eksekutif. Pada tahap ini, berbagai pihak dapat saling bersaing saat sumber daya manusia dan keuangan hadir untuk melaksanakan kebijakan. Sebagian besar pelaksana

mungkin menentang pelaksanaan kebijakan, sementara yang lain mungkin mendukungnya.

- e. Tahap evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap dampak kebijakan yang telah dijalankan. Kriteria dan ukuran ditetapkan sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Evaluasi ini merupakan langkah kritis untuk menentukan efektivitas dan relevansi kebijakan publik.

3. Implementasi Kebijakan (Edward III)

Seperti yang dinyatakan oleh Turhundayani dan Halim et al., implementasi kebijakan publik adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik karena berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan publik dan hasil atau dampak yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, suatu program kebijakan harus dijalankan dengan cermat agar dapat memberikan pengaruh yang diharapkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan” (Wahab, 2011). Maka dari itu Edward III merumuskan sebuah model implementasi kebijakan Edward III terdiri dari beberapa unsur antara lain Komunikasi (komunikasi), sumber daya (sumber daya), sikap (sikap atau sikap), dan struktur birokrasi (struktur birokrasi). Keempat komponen tersebut harus dilakukan secara bersamaan karena saling berhubungan. Model ini mempermudah pemahaman dengan memisahkan pelaksanaan ke dalam elemen-elemen kunci. Untuk membantu memahami dampak penerapan kebijakan, subkategori faktor penting ditampilkan. Hal ini karena realisasi kebijakan merupakan proses yang selalu berubah di mana banyak faktor

interaksi satu sama lain (Mulyono, 2009). Empat komponen tersebut bisa dikatakan saling berkaitan, antara lain secara definitif:

a. Komunikasi

Kesuksesan implementasi kebijakan dalam masyarakat dapat dicapai dengan memastikan pemahaman yang tepat oleh para pelaksana terhadap tugas yang harus dijalankan. Klarifikasi yang jelas terkait tujuan serta sasaran kebijakan juga perlu disampaikan secara efektif kepada kelompok yang menjadi sasaran agar dapat mengurangi potensi distorsi dalam pelaksanaan. Ketidajelasan atau ketidaktahuan kelompok sasaran terhadap tujuan dan sasaran kebijakan dapat menimbulkan resistensi yang mungkin muncul.

b. Sumberdaya

Meskipun konten kebijakan sebelumnya telah disampaikan secara tegas dan juga konsisten, keberhasilan implementasinya tetap tergantung pada ketersediaan sumberdaya yang memadai. Sumberdaya ini dapat berupa aspek manusia, melibatkan kompetensi para pelaksana kebijakan, dan aspek finansial. Ketersediaan sumberdaya tersebut memainkan peran krusial dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumberdaya yang memadai, kebijakan hanya akan bersifat deklaratif pada dokumen tanpa dapat direalisasikan secara nyata.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi merujuk pada sifat dan karakteristik yang melekat pada implementor suatu kebijakan, termasuk komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Kualitas disposisi yang positif pada implementor dianggap sebagai faktor penentu kesuksesan dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, implementor yang memiliki disposisi yang baik diyakini mampu melaksanakan kebijakan dengan efektif dan sesuai dengan niatan

awal pembuat kebijakan. Sebaliknya, ketidaksesuaian disposisi atau pandangan antara implementor dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas proses implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang menangani pelaksanaan kebijakan sangat memengaruhi pelaksanaannya. Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam melakukan tugas mereka, merupakan komponen penting dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan pembentukan rantai pengawasan yang terlalu panjang dan munculnya redtape, yaitu proses birokrasi yang kompleks dan rumit. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan organisasi tidak dapat mengubah gaya operasinya. (Roring et al., 2021).

4. *Stunting*

a. Konsep *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak dalam kandungan atau pada dua tahun pertama kehidupan. Konsep stunting melibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat, biasanya ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usia anak. Menurut WHO (2015). Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

b. Penyebab *Stunting*

Faktor penyebab stunting bisa sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik faktor biologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Supariasa & Purwaningsih, 2019). Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama dari stunting:

- 1) Kurangnya Gizi: Kekurangan gizi merupakan faktor utama yang menyebabkan stunting. Nutrisi yang tidak mencukupi, terutama protein, energi, zat besi, vitamin A, vitamin D, zinc, dan asam folat, dapat menghambat pertumbuhan linier anak-anak.
- 2) Infeksi dan Penyakit: Infeksi kronis seperti diare, infeksi saluran pernapasan, parasit, dan penyakit menular lainnya dapat mengganggu penyerapan nutrisi serta menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak, yang pada akhirnya dapat menyebabkan stunting. Salah satu hal yang umumnya dapat ditemukan adalah orang tua yang merokok didekat anaknya, hal tersebut dapat mengakibatkan anak terdampak berbagai gangguan kesehatan dari asap rokok tersebut (Duhita & Rahmawati, 2019).
- 3) Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak sehat, seperti sanitasi yang buruk, air bersih yang tidak tersedia, dan kepadatan penduduk yang tinggi, dapat meningkatkan risiko stunting. Di Kota Batu sendiri, menurut data dari Web Site Satu Data Indonesia keseluruhan Desa di Kota Batu sudah berhenti untuk buang air besar sembarangan. Data tersebut terhitung mulai dari 2020-2022 (Satu Data Indonesia, 2020) Paparan terhadap polusi udara dan lingkungan yang kumuh juga dapat mempengaruhi kesehatan anak dan pertumbuhannya.
- 4) Faktor Sosial-Ekonomi: Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak karena keterbatasan ekonomi dapat menjadi faktor risiko stunting. Ketidakstabilan ekonomi keluarga, rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan ibu, serta ketidakmampuan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi juga berperan dalam menyebabkan stunting.

- 5) Faktor Genetik: Faktor genetik atau pewarisan genetik juga dapat memainkan peran dalam stunting. Faktor-faktor genetik tertentu dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan linier pada anak-anak, meskipun faktor-faktor lingkungan dan gizi juga sangat berpengaruh.
- 6) Kurangnya Pemantauan Kesehatan dan Perawatan: Kurangnya akses atau partisipasi dalam layanan kesehatan dan gizi, termasuk antenatal dan perawatan postnatal, serta kurangnya pemantauan pertumbuhan anak-anak, dapat meningkatkan risiko stunting.

c. Dampak *Stunting*

Dampak dari stunting sangat serius dan kompleks, baik secara fisik maupun kognitif (Nirmalasari, 2020). Berikut adalah beberapa dampak dari stunting:

- 1) Rendahnya Pertumbuhan Fisik: Stunting mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usianya. Hal ini dapat menghambat perkembangan fisiknya secara keseluruhan.
- 2) Gangguan Kognitif: Kekurangan gizi yang menyebabkan stunting juga dapat berdampak pada perkembangan otak dan kognisi anak. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, termasuk masalah dalam belajar, konsentrasi, dan daya ingat.
- 3) Gangguan Perilaku dan Emosional: Stunting dapat menyebabkan masalah perilaku dan emosional pada anak, seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan hubungan sosial anak di masa depan.
- 4) Penyakit Kronis: Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi di kemudian hari.

Kondisi ini disebabkan oleh perubahan metabolisme dan pola makan yang buruk yang sering terjadi pada individu yang mengalami stunting sejak dini.

- 5) Menurunnya Produktivitas dan Pendapatan: Individu yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah di masa dewasa, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan mereka secara ekonomi dan pada tingkat kemiskinan di masyarakat.
- 6) Siklus Kemiskinan yang Berkelanjutan: Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih terbatas di masa dewasa, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan dan mengalami stunting pada generasi berikutnya.

d. Penanganan *Stunting*

Penanganan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek seperti gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan lingkungan (Purbowati et al., 2021). Berikut beberapa cara dalam melakukan penanganan stunting:

- 1) Intervensi Gizi:
 - a) Suplementasi Gizi: Pemberian makanan tambahan seperti zat besi, vitamin A, dan suplemen gizi lainnya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang mungkin kurang terpenuhi.
 - b) Peningkatan Asupan Gizi: Meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral, terutama pada anak-anak yang rentan mengalami kekurangan gizi.

- c) Pemberian ASI Eksklusif: Memberikan ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak untuk memastikan asupan gizi yang cukup dan mendukung pertumbuhan optimal.
- 2) Pelayanan Kesehatan:
- a) Pemeriksaan Rutin: Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak.
 - b) Imunisasi: Memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan.
- 3) Pengasuhan dan Pendidikan Orang Tua:
- a) Pendidikan Gizi: Memberikan informasi kepada orang tua atau pengasuh tentang pentingnya gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan anak.
 - b) Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan: Mendorong interaksi yang positif antara orang tua dan anak serta memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.
- 4) Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan:
- a) Akses Air Bersih: Memastikan akses yang memadai terhadap air bersih untuk konsumsi dan kebersihan diri.
 - b) Sanitasi Lingkungan: Meningkatkan sanitasi lingkungan dengan mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta menyediakan fasilitas sanitasi yang layak.
- 5) Intervensi Komunitas dan Kebijakan Publik:
- a) Program Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting melalui program-program edukasi, pelatihan, dan dukungan sosial.

- b) Kebijakan Publik: Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting, seperti program kesehatan dan gizi anak, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi.

5. POZTING

Pozting merupakan akronim dari “Pos Gizi Penanganan Stunting” Program ini merupakan program yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang tua anak penderita stunting. Program tersebut merupakan salah satu dari banyaknya program yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan menunjang permasalahan terkait gizi pada masyarakat (Arwin dkk., 2022). Pozting sendiri memiliki berbagai program antara lain diantaranya adalah edukasi mengenai gizi, pemeriksaan kesehatan anak yang dilakukan secara rutin, serta permainan edukatif yang dapat merangsang kreativitas dan perkembangan pada otak anak (Padang.go.id, 2023).

Program Pozting ini juga merupakan sebuah program yang saling terintegrasi antara posyandu, puskesmas, pemerintah desa, dan warga, karena mengingat bahwasanya stunting merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Penambahan pada konteks ini mengindikasikan bahwa masalah stunting pada anak balita merupakan fokus utama RPJMN tahun 2020 hingga 2024, dengan tujuan mengurangi prevalensi secara signifikan. Target penurunan yang ditetapkan adalah dari 24,4 persen di 2021 hingga menjadi 14 persen di 2024 yang akan datang (Wahyu, 2022).

Pozting ini sendiri melibatkan sebuah komunikasi melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan setiap hari Sabtu, lalu juga

melibatkan banyak sumber daya seperti pemerintah desa dan Posyandu sebagai pendamping masyarakat, yang nantinya diharapkan memiliki sebuah sikap untuk peduli dan menangani masalah stunting secara cepat dan tanggap. Mengingat bahwasanya stunting merupakan sebuah problem yang serius dengan skala nasional maka perlulah suatu kesadaran dalam masyarakat sekaligus seluruh pihak yang berwajib dalam menyelaraskan pemikiran tentang Pozting ini yang akan diselenggarakan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Pembentukan dari Pozting ini memiliki beberapa tujuan baik itu yang umum ataupun khusus, antara lain:

a. Tujuan Umum

- Menjalin integrasi tindakan dan pemikiran tentang stunting

b. Tujuan Khusus

- Mengedukasi masyarakat tentang bahaya stunting pada balita
- Memberikan pemahaman tentang menu sehat dan bergizi (Antara, 2019).
- Membentuk wadah bagi anak-anak untuk berinteraksi sesama dan membangun pola pikir anak agar tidak kecanduan dengan gawai handphone.
- Meningkatkan peran dan kepedulian masyarakat terhadap stunting
- Mengedukasi orang tua tentang makanan sehat melalui praktik masak